

## Siaran Pers

### ***WUJUDKAN INKLUSI DISABILITAS TEPAT SASARAN, PEMERINTAH INDONESIA PERKUAT PERAN RISET***

**JAKARTA (8/12)** – Dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 8 Desember 2016, Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan CBM, Netherlands Leprosy Relief (NLR), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), dan Pusat Kajian Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUKAPA) mengadakan Seminar Nasional “Menjembatani Kesenjangan Pengetahuan: Penyusunan Agenda Riset Nasional untuk Pengembangan Kebijakan dan Program Inklusi Disabilitas” di Hotel Double Tree, Jakarta. Seminar diadakan sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah untuk mengarusutamakan isu-isu disabilitas dan mengidentifikasi kebijakan serta prioritas pembangunan yang lebih inklusif.

Seminar diawali dengan sesi pleno yang dipandu Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Co-Director The International Centre for Evidence in Disability, London, Hannah Kuper, dan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Gantjang Amanullah. Pleno membahas berbagai perspektif inklusi disabilitas, termasuk seputar kerugian ekonomi terhadap pengecualian disabilitas dan keuntungan dari inklusi disabilitas, urgensi berinvestasi pada kecakapan penyandang disabilitas, serta situasi demografi terkait penyandang disabilitas yang terkini di Indonesia.

Seminar dihadiri para pemangku kepentingan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, kementerian/lembaga lainnya, serta para akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan merancang agenda riset yang sejalan dengan rencana strategis pemerintah tentang disabilitas. “Kami menyadari bahwa demi memastikan bahwa program-program bagi penyandang disabilitas berjalan dengan optimal dan tepat sasaran, kami sangat membutuhkan riset berdasarkan bukti yang tepat. Hal itulah yang ingin diperkuat dengan seminar ini, yakni menyusun agenda riset dengan para pihak terkait untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif atas disabilitas,” ujar Direktur Vivi.

Selepas pleno, seminar dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas tema-tema besar terkait dengan layanan dasar inklusif bagi penyandang disabilitas, peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui perluasan program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan penghidupan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Selama ini, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan menggarisbawahi kebutuhan untuk memperhatikan isu-isu disabilitas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Orang dengan Disabilitas atau *Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)* melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan mengesahkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu kehidupan penyandang disabilitas ke arah yang lebih baik. Pemerintah menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai kebutuhan beragam yang perlu dipenuhi melalui sistem perlindungan sosial yang tepat. Maka, pemerintah Indonesia terus mendorong program-program untuk penghidupan yang inklusif dan berkelanjutan melalui akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pinjaman, dan kesempatan untuk bekerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas. “Selain menggalakkan riset, Indonesia juga tengah fokus untuk menghadapi sejumlah tantangan terkait inklusi disabilitas, seperti data-data soal penyandang disabilitas yang sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan, penentuan sasaran, implementasi, hingga evaluasi program,” tegas Direktur Vivi.

### **Tentang Seminar Inklusi Disabilitas**

Seminar ini merupakan hasil kerja sama antara Bappenas dengan dukungan CBM, Netherlands Leprosy Relief (NLR), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), dan Pusat Kajian Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Untuk informasi lebih komprehensif tentang kegiatan ini, layangkan surat elektronik ke [clarasiagian@puskapa.org](mailto:clarasiagian@puskapa.org). ■

Jakarta, 5 Desember 2016

Vivi Yulaswati

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 391 5227 ext. 3210; Faksimili: (021) 391 5227  
Email: [ditpk\[at\]bappenas.go.id](mailto:ditpk[at]bappenas.go.id)

